

**PERANAN DIMENSI LINGKUNGAN SOSIAL POLITIK DALAM PENGAMBILAN
KEBIJAKAN DALAM SEKTOR PENDIDIKAN
DI KOTA MAKASSAR**

**Oleh:
Bachtiar
Universitas Pejuang Republik Indonesia**

Abstrak

Pendidikan bukanlah satu-satunya hal yang menjadi tulang punggung pembangunan bangsa, pendidikan tidak bisa berdiri sendiri sebagai kekuatan penggerak bangsa, tapi pendidikan adalah salah satu pondasi pokok pembangunan bangsa, masyarakat yang cerdas, mandiri dan berdikari baru dapat terbentuk ketika rakyat mendapat pendidikan yang cukup dan memberikan wacana bersama. Dalam hal ini pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan tertinggi di daerahnya masing-masing memegang peranan penuh dalam pengambilan kebijakan. Apakah kebijakan yang diambil itu mampu mengakomodir semua kebutuhan dari rakyat dan bisa menjadi salah satu faktor kemajuan daerahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang sejauh mana pengaruh dimensi lingkungan terhadap proses pengambilan kebijakan dalam sektor pendidikan di Kota Makassar dan untuk menjelaskan proses pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan di Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan publik dalam sektor pendidikan di Kota Makassar dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan itu sendiri dan oleh nilai-nilai politik yang lebih mencerminkan kehendak atau persepsi penguasa, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan memperlihatkan suasana dominan pengaruh dari kepentingan pemerintah daerah Kota Makassar. Kenyataan tersebut termasuk juga pengaruh dalam proses analisisnya yang cenderung lebih menekankan nilai-nilai dan pandangan sepihak dari Pemerintah Kota Makassar.

Lingkungan kebijakan publik dari dimensi sosial mengenai kebijakan dalam sektor pendidikan selama ini cenderung pasif, di mana tidak terdapat persepsi yang sama di kalangan masyarakat mengenai siapa sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Namun bagi masyarakat yang penting adalah bagaimana kebutuhan akan pendidikan dapat tersedia.

Kata Kunci: Lingkungan Sosial Politik; Pengambilan Kebijakan

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah faktor penting dalam menggerakkan roda pembangunan bangsa, pendidikan yang kuat dan berkualitas akan mampu mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas pula. Sumber daya manusia yang berkualitas dengan kompetensi keilmuan tinggi merupakan salah satu potensi besar yang akan mampu meningkatkan target-target pembangunan bangsa. Hal ini seperti termaktub dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, Bab II tentang Dasar, Fungsi dan Tujuan, pasal 3 yakni *"Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional"*.

Pendidikan memang bukan satu-satunya hal yang menjadi tulang punggung pembangunan bangsa, pendidikan tidak bisa berdiri sendiri sebagai kekuatan penggerak bangsa, tapi pendidikan adalah salah satu pondasi pokok pembangunan bangsa, masyarakat yang cerdas, mandiri dan berdikari baru dapat

terbentuk ketika rakyat mendapat pendidikan yang cukup dan memberikan wacana bersama. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan tertinggi di daerahnya masing-masing memegang peranan penuh dalam pengambilan kebijakan. Apakah kebijakan yang diambil itu mampu mengakomodir semua kebutuhan dari rakyat dan bisa menjadi salah satu faktor kemajuan daerahnya.

Akhirnya dunia pendidikan pun tidak tergerak untuk mencetak manusia-manusia siap pakai. Sekolah-sekolah kejuruan yang ada kurang berkembang, orang merasa lebih bergengsi apabila tamat dari sekolah umum dari pada sekolah kejuruan karena para siswa sekolah kejuruan dianggap kurang berkemampuan secara intelektual dibandingkan anak-anak dari sekolah umum. Alhasil, semakin sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk bekerja secara teknis dan sarjana-sarjana yang tumbuh dari bawah.

Berdasarkan hasil pengamatan serta didukung oleh berbagai informasi, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar dalam merumuskan kebijakan belum bisa menyentuh semua aspek lingkungan yang ada di kota Makassar. Kurang optimalnya kebijakan yang dikeluarkan itu merupakan sebuah cerminan bahwa Pemerintah Kota Makassar kurang mengetahui dan menganalisa segala hal yang dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Maka hasilnya akan ada pro dan kontra tentang kebijakan tersebut.

Disinilah peran penting Pemerintah Kota Makassar dalam membuat sebuah kebijakan yang diharapkan mampu mengatasi semua permasalahan yang kompleks ini. Upaya untuk meningkatkan penguasaan iptek masyarakat telah dilaksanakan, akan tetapi belum berjalan dengan baik dan akhirnya tujuan yang diinginkan tidak sepenuhnya tercapai. Hal ini bukan perkara yang mudah, masalah utamanya adalah biaya pendidikan. Tetapi bukan hanya itu, budaya menghargai simbol-simbol formal di masyarakat merupakan hal yang sangat menghambat kemajuan penguasaan iptek. Entah sejak kapan masyarakat merasa lebih terpondasi di lingkungannya apabila telah memiliki gelar kesarjanaan dari pada memiliki kemampuan nyata untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Dari berbagai fenomena yang mencakup permasalahan tentang kebijakan terutama pada sektor pendidikan di Kota Makassar, maka masih sangat perlu peran penting Pemerintah Kota Makassar untuk menyusun sebuah kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut. Dengan memperhatikan pengaruh dari lingkungan-lingkungan sosial di masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan nantinya bisa menjadi sebuah kebijakan yang berguna bagi masyarakat kota Makassar nantinya.

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah sejauhmana peranan dimensi lingkungan sosial politik dalam proses pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan dasar di Kota Makassar?

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan

Dye (1987: 3) merumuskan kebijakan publik sebagai semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, Edward & Skarkansky (1978: 2) juga tidak menunjukkan arti penting aspek lingkungan melalui sorotan mereka atas pengertian kebijakan publik sebagai apa yang dikatakan

dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukan pemerintah. Selanjutnya Lindblom (dalam Wahab, 1990: 26) mengemukakan bahwa:

Kebijakan publik adalah: *"The Boundaries of wich the most uncertain, somehow a complex ser of forces that we "policy making" all taken together, produced effect call "policies"* (merupakan suatu proses politik yang kompleks, bersifat analisis dan politik yang tidak mempunyai awal atau akhir dan batas dari proses tersebut umumnya tidak pasti. Kadangkala rangkaian-rangkaian kekuatan yang kompleks yang kita sebut pembuatan kebijakan itu menghasilkan suatu akibat yang kita namakan kebijakan).

Pendapat Lindblon tersebut mempunyai penekanan yang sama dengan apa yang dikemukakan Easton (1964: 130) bahwa kebijakan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan untuk mengalokasikan nilai. Nilai di sini adalah nilai politik yang lebih mencerminkan kehendak atau persepsi penguasa. Kedua pendapat ini mempunyai makna yang lebih tegas bahwa kebijakan publik itu merupakan kehendak penguasa (pemerintah) dalam menggerakkan kekuasaan poltiknya. Wahab (1990) dengan mendasarkan pada pendapat Heclo (1972: 84) mengatakan bahwa kebijakan lebih dapat dipandang sebagai tindakan yang sengaja dilakukan atau ketidakmauan untuk bertindak secara sengaja daripada dipandang sebagai keputusan atau tindakan tertentu (Wahab, 1990: 21).

Menurut Budiarto (1977: 72) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan, sedangkan keputusan adalah "membuat pilihan di antara beberapa alternatif" sehingga terminologi pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi samapi keputusan itu tercapai. Disinilah terkandung arti bahwa dalam kebijakan akan ditemukan sejumlah keputusan, dan setiap keputusan berada dalam proses pengambilan keputusan. Ketika sejumlah keputusan dikumpulkan maka hal itu akan berwujud sebagai suatu kebijakan.

Kerangka Konseptual

Pengaruh lingkungan seperti yang dikemukakan oleh Dunn bahwa studi mengenai kebijakan publik akan lebih komprehensif jika dikaitkan dengan faktor lingkungan karena efektivitas sebuah kebijakan akan tercapai bila kebijakan publik itu sendiri peka terhadap lingkungan (*Environment*) bukan hanya sebagai produk dari subjek (pelaku) semata terhadap adanya tuntutan dari problem publik. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dalam pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan kiranya pemerintah Kota Makassar dapat lebih memperhatikan pengaruh lingkungan agar kebijakan yang dihasilkan dapat menyetuh semua lapisan masyarakat.



METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survey yaitu metode penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan variabel, sosiologis maupun psikologis. Metode ini digunakan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam tapi bisa menghasilkan data yang akurat bila digunakan sampel yang representatif.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Makassar dan juga pihak-pihak yang secara langsung terlibat dengan proses pembuatan kebijakan publik. Dimana populasi adalah keseluruhan individu yang menjadi sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Makassar yang tentunya menjadi pengambil kebijakan, khususnya kebijakan dalam sektor pendidikan. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 orang yang kesemuanya adalah aparat Pemerintah Kota Makassar karena dianggap bisa memberikan data yang akurat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perumusan Kebijakan

Dalam hal ini proses perumusan kebijakan itu sendiri telah ditetapkan dan diatur sebelumnya agar prosesnya dapat berjalan dengan baik. Namun kadangkala dalam pelaksanaannya itu terdapat berbagai macam tindakan-tindakan yang kurang mengutamakan kepentingan masyarakat. Agar lebih jelas bagaimana prosesnya maka pendapat berikut ini dapat memberi penjelasan tersebut. Menurut Kepala Bagian Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan dasar beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“...Proses pembuatan kebijakan disini de' terdapat dalam rencana strategis dinas pendidikan yang dibuat sekali dalam 5 tahun juga ada dalam rencana tahunan....” (Wawancara, 2017).

Hal senada juga dikatakan oleh salah seorang pegawai Dinas Pendidikan Kota Makassar yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa:

“...Kalau kebijakan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Makassar biasanya dilakukan melalui rapat-rapat kecil kemudian berlanjut pada tingkat yang lebih tinggi, tapi biasanya yang terlibat atasan-atasan ji de'...” (Wawancara, 2017).

Dari hasil wawancara di atas dan berdasarkan hasil observasi dengan membaca Renstra Dinas Pendidikan Kota Makassar penulis menyimpulkan kebijakan yang dirumuskan itu hadir berdasarkan Renstra tersebut yang dimana telah diatur Visi dan Misi dari Dinas Pendidikan yang menjadi tolak ukur dalam merumuskan sebuah kebijakan.

Akan tetapi ada beberapa pendapat yang berbeda ketika pertanyaan yang lainnya penulis ajukan kepada informan yang berada diluar pegawai Dinas Pendidikan Kota Makassar. Karena dalam proses

perumusan kebijakan interaksi antara pembuat dan lingkungan sekitarnya sangat diperlukan namun disini apakah telah berjalan dengan semestinya.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mr. X sebagai berikut:

"...Keluarnya sebuah kebijakan kadang-kadang tidak terlalu memperdulikan keinginan atau tuntutan dari masyarakat sehingga setiap kebijakan yang telah dirumuskan tidak mampu memenuhi tuntutan-tuntutan dari masyarakat, itu menandakan kurangnya interaksi antar masyarakat dengan pemerintah kota..." (Wawancara, 2017).

Hal senada juga dikemukakan oleh salah seorang Kepala Sekolah Menengah Pertama di Makassar yang meminta identitasnya disembunyikan, bahwa:

"...Proses perumusan kebijakan khususnya di sektor pendidikan itu tidak diketahui oleh kalangan bawah atau masyarakat pada umumnya sehingga terkadang ada sebagian masyarakat yang kurang puas dengan kebijakan tersebut dan sering juga merugikan masyarakat karena tidak ada pertemuan secara langsung antara pemerintah dan masyarakat..." (Wawancara, 2017).

Pendapat serupa dikemukakan oleh salah seorang masyarakat di Kecamatan Ujung Tanah yang menolak disebut identitasnya.

"...selama ini saya kurang mengetahui mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah..." (Wawancara, 2017).

Pengaruh Dimensi Lingkungan Sosial Politik

Dalam penelitian ini yang paling ditekankan adalah unsur lingkungan yang mempunyai peranan penting dalam proses perumusan kebijakan. Seperti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah seorang penduduk yang bertempat tinggal di Jl. Sunu mengatakan bahwa:

"...Iya, pengaruh lingkungan sangat berdampak terhadap kualitas pendidikan dimana kondisi masyarakat setempat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka, apabila tingkat pendidikan mereka tinggi maka daerah tersebut juga akan baik kualitas pendidikan begitu pula sebaliknya..." (Wawancara, 2017).

Dari pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa kondisi suatu daerah itu dapat mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakatnya. Dimana kalau daerah tersebut pemukiman kumuh atau perkampungan nelayan maka kualitas pendidikan yang didapat di sana pun akan rendah namun ketika daerah yang boleh dikatakan makmur dan sejahtera dari tingkat ekonomi maka sudah tentu kualitas pendidikan yang didapatkan pun akan baik.

Ilmu lingkungan dikembangkan berdasarkan suatu disiplin yang disebut "*ekologi*". Secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup (Soemarwoto, 1985).

Dalam konteks kebijakan publik, lingkungan yang dipelajari tidak hanya menitik beratkan pada hubungan timbal balik dan sebab akibat antara manusia dan lingkungan yang melingkupinya baik fisik maupun non fisik, akan tetapi juga memfokuskan kajian pada apakah perbuatan penentu kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuatnya memberi manfaat dan resiko terhadap dirinya, terhadap makhluk hidup lainnya. Kalau dapat memberikan manfaat berarti tindakan tersebut dapat dikatakan benar, tetapi

sebaliknya berarti tindakan tersebut keliru. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu lingkungan kebijakan harus memasukkan aspek moral alam ke dalam moral manusia penentu kebijakan.

Dalam penelitian ini apakah kebijakan yang dikeluarkan sudah memenuhi kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat berikut hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan kepala-kepala sekolah di Kota Makassar. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang pedagang kaki lima di sentral bahwa :

“...tidak! itu dapat dilihat masih banyak anak-anak yang putus sekolah sehingga anak-anak menjadi pekerja dibawah umur dan ini juga yang menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas di kota ini...” (Wawancara 8 Maret 2017).

Pendapat serupa diungkapkan oleh Dg. Na'ba yang berpendapat:

“...selama ini saya tidak pernah merasa kalau tuntutan dan keinginan saya dapat dipenuhi, didengarkan saja tidak pernah jadi kesimpulannya pemerintah tidak pernah mau mendengarkan apa yang menjadi masalah dan yang dituntut oleh masyarakat...” (Wawancara, 2017).

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh salah seorang kepala sekolah dasar seperti yang berikut ini:

“...saya rasa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah kota sudah mewakili tuntutan dan keinginan dari masyarakat...” (Wawancara, 2017)

Dari beragam pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam merumuskan sebuah kebijakan Pemerintah Kota Makassar belum bisa memenuhi kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat kalangan bawah tetapi hanya bisa mendengarkan tuntutan dari kalangan elit politis saja karena kebijakan yang dihasilkan adalah hasil dari kepentingan-kepentingan kaum tertentu.

Kondisi fisik tempat memperoleh pendidikan pun secara besar mempengaruhi kualitas pendidikan di Kota Makassar dan kebijakan-kebijakan yang akan dirumuskan. Pembelajaran yang dilakukan dalam ruang kelas yang memadai maka akan efektif pula proses belajar mengajar tetapi sebaliknya proses tersebut akan terganggu apabila ruang kelas atau kondisi dari sekolah tersebut kurang memadai atau bisa di katakan rusak.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan jumlah SD di Kota Makassar sebanyak 453 buah yang terdiri dari 365 SD Negeri dan 88 SD Swasta. Jumlah murid SD sebanyak 134.822 orang yang terdiri dari 112.178 murid SD Negeri dan 22.644 murid swasta dengan 3.504 rombongan belajar. Jumlah ruang kelas sebanyak 2.686 dengan kondisi 55% baik, 26% rusak ringan, 5% rusak sedang dan 17% rusak berat. Jumlah SMP di Kota Makassar sebanyak 161 unit yang terdiri dari 37 SMP Negeri dan 124 SMP Swasta. Jumlah siswa SMP sebanyak 54.834 orang yang terdiri dari 31.658 siswa SMP Negeri dan 23.176 siswa SMP swasta. Jumlah ruang kelas sebanyak 1.278 unit dengan kondisi 66% baik, 5,48% rusak ringan, 3,91% rusak sedang dan 2,35% rusak berat.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa cukup banyak sekolah-sekolah dengan ruang kelas yang rusak. Bagaimana kita mau meningkatkan kualitas pendidikan kita kalau sarana dan prasarannya pun masih banyak yang terbengkalai. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan masyarakat tentang pendapat mereka terhadap kondisi-kondisi sekolah yang rusak di Kota Makassar ini seperti pendapat salah seorang

orang tua murid di bawah ini:

"...sekolah-sekolah disini itu kalau yang sekolah elit pasti bagus-bagus tapi coba lihat di daerah yang agak jauh dari perkotaan pasti masih banyak yang rusak, prihatin juga mesti lihat anak-anak belajar di sekolah yang sudah rusak. Bagaimana mereka mau serius belajar kalau tempat mereka untuk belajar saja seperti kandang..." (Wawancara, 2017).

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh salah seorang Kepala Sekolah di Makassar yang mengatakan bahwa:

"...Sekolah-sekolah yang masih rusak itu dikarenakan kurangnya manajemen penggunaan dana BOS yang telah diberikan oleh pemerintah. Karena setiap sekolah pasti sudah mendapatkan pembagian dana BOS dari pemerintah untuk perbaikan sarana dan prasarana sekolah namun mungkin dalam pelaksanaannya dana tersebut telah diselewengkan, siapa yang tahu?..." (Wawancara, 2017).

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh informan maka peneliti menyimpulkan bahwa pada kenyataannya masih banyak sekolah-sekolah yang rusak akan tetapi upaya untuk menanggulangi masalah tersebut adalah dengan program dana BOS. Namun mungkin masih banyak pihak-pihak yang menyalah gunakan kesempatan untuk mendapatkan rejeki yang tidak halal namun berdampak buruk bagi dunia pendidikan kita.

Dalam membuat keputusan seringkali pembuat keputusan mengalami konflik nilai. Nilai-nilai yang dianutnya (*personal values*) seringkali bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan (*Policy Values*), atau sebaliknya dalam kondisi seperti itu. Dengan demikian, bagi pembuat kebijakan tidak ada alternatif lain kecuali menjadikan sistem nilai masyarakatnya sebagai pedoman atau landasan dalam setiap proses perumusan kebijakan. Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa informan yang ditanya tentang pendapat mereka akan hal ini. Seperti yang dikatakan oleh Mr. X bahwa:

"...selama ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkesan ada muatan politis di dalamnya bagaimana dunia pendidikan kita mau maju kalau kebijakannya nanti hanya menguntungkan segelintir orang saja..." (Wawancara, 2017).

Hal senada dikemukakan oleh salah seorang pemuda yang tinggal di Perintis Kemerdekaan VI bernama Suti yang mengayakan bahwa:

"...kebijakan yang ada pasti tidak jauh-jauh dari kepentingan politik semata itu yang menyebabkan mengapa mutu pendidikan kita rendah..." (Wawancara, 2017).

Dari beberapa pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa selama ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah masih banyak muatan politisnya dan itulah yang menyebabkan mutu pendidikan kita masih rendah disebabkan karena kebijakan itu hanya merupakan perwakilan kepentingan dari pihak-pihak tertentu. Namun ada pendapat yang berbeda dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar, beliau mengatakan:

"...semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan sama sekali tidak mengandung unsur politis karena semuanya telah disesuaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat dan dirumuskan dalam Renstra Dinas Pendidikan..." (Wawancara, 2017).

Dari pendapat tersebut peneliti bisa menyimpulkan bahwa semua kebijakan yang mau dikeluarkan

oleh pemerintah dalam hal ini, sama sekali tidak ada muatan di dalamnya karena sudah diatur sebelumnya dalam renstra dinas pendidikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan sebelumnya, pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik dalam sektor pendidikan di Kota Makassar dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan itu sendiri dan oleh nilai-nilai politik yang lebih mencerminkan kehendak atau persepsi penguasa, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan memperlihatkan suasana dominan pengaruh dari kepentingan Pemerintah Kota Makassar. Kenyataan tersebut termasuk juga pengaruh dalam proses analisisnya yang cenderung lebih menekankan nilai-nilai dan pandangan sepihak dari Pemerintah Kota Makassar.

Lingkungan kebijakan publik dari dimensi sosial mengenai kebijakan dalam sektor pendidikan selama ini cenderung pasif, di mana tidak terdapat persepsi yang sama di kalangan masyarakat mengenai siapa sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Namun bagi masyarakat yang penting adalah bagaimana kebutuhan akan pendidikan dapat tersedia. Adapun keluhan-keluhan yang dirasakan ataupun kekurangan-kekurangan yang dihadapi umumnya sudah terbiasa di atasi sendiri oleh mereka.

Proses perumusan kebijakan pada sektor pendidikan tidak dapat dipandang sebagai suatu respon politik terhadap aspirasi masyarakat, tetapi lebih cenderung merupakan suatu inisiatif dari sistem politik Pemerintah Daerah Kota Makassar. Rendahnya kualitas nilai aspiratif masyarakat tersebut semakin memperkuat dominannya nilai politik penentu kebijakan publik pada sektor pendidikan.

Nilai politik yang dimaksud adalah nilai yang dianut oleh kelompok elit penentu kebijakan berupa perwujudan keinginan-keinginan, persepsi-persepsi dan nilai kelompok yang dianut oleh kelompok elit tersebut. Sektor pendidikan di Kota Makassar masih menjadi sorotan utama karena angka anak putus sekolah dan pekerja di bawah umur serta tingginya angka kriminal merupakan hasil dari rendahnya kualitas pendidikan yang ada di kota Makassar.

Dimensi Lingkungan sosial yang selama ini terpinggirkan oleh Pemerintah Kota Makassar seperti keadaan masyarakat, tingkat kesejahteraan dan tingkat pendidikan harus diperhatikan secara seksama karena dalam merumuskan sebuah kebijakan hendaknya memperhatikan faktor lingkungan. Karena lingkunganlah tempat kebijakan tersebut dijalankan, apabila tidak memperhatikan faktor lingkungan maka kebijakan tersebut akan menjadi tidak efektif.

Banyak para pengambil kebijakan yang belum mampu dalam merencanakan program atau kebijakan yang di keluarkan sehingga menyebabkan pelayanan dalam bidang pendidikan tidak efektif dan efisien. Proses perumusan kebijakan pada sektor pendidikan di Kota Makassar secara keseluruhan belum dianggap efektif. Hal ini disebabkan karena masih sangat minimnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan dalam hal Kebijakan yang akan di keluarkan.

Saran

1. Dalam proses pengambilan kebijakan masukan-masukan dari masyarakat harus lebih diperhatikan agar nantinya kebijakan yang diambil tidak hanya memuaskan pihak-pihak tertentu namun juga memuaskan masyarakat yang ada.
2. Peningkatan mutu pendidikan lewat perbaikan infrastruktur sekolah-sekolah yang ada di Makassar serta peningkatan kualitas tenaga pengajar yang ada agar mutu pendidikan di kota Makassar dapat menjadi lebih baik dari sekarang.
3. Pemerintah kota Makassar dalam hal merumuskan sebuah kebijakan haruslah memperhatikan faktor lingkungan eksternal agar kebijakan yang dibuat bisa mewakili semua lapisan masyarakat.
4. Masyarakat harus lebih partisipatif dalam hal ini agar nantinya masyarakat bisa lebih mengetahui dan memahami proses - proses dalam perumusan kebijakan sehingga mereka bisa turut serta membangun mutu pendidikan di kota Makassar ini.
5. Harus terjalin suatu komunikasi yang terarah dari pada Dinas ataupun instansi yang terkait dengan masalah pendidikan. Sehingga sosialisasi kebijakan yang akan di keluarkan dapat dengan mudah di pahami dan di tanggapi oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaid Zaenal, 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Tim Pencur Siswa.
- Anderson, James E, 1979. *Public Policy Making (Second Edition)*. New York: Holt, Rinehat and Winston.
- Daft, Richard L, 1992. *Organization Theory and Design*. Singapore: West Publishing Company.
- Dunn, William N, 1994. *Public Policy Analysis: (Second Edition)*. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Dye, Thomas R, 1976. *Policy Analysis*. Alabama: Univercity of Alabama Press.
- Easton, David, 1959. *The Political System*. New York: Knopf.
- Lindblom, Charles E, 1986. *Proses Penetapan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga,.
- Mustopadidjaja, AR. 2003. *Dimensi - Dimensi Pokok Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: LAN, Duta Pertiwi Foundation.
- Nazir, Mohammad, 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Kota Makassar, 2004. *Profil Kota Makassar Dalam Rangka Bangun Praja.*, Makassar.
- Sitanggang, 1996. *Ekologi Pemerintahan*. Jakarta: CV. Muliasari.
- Sugiyono, 1992. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wahab, Solichin A, 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.